



P U T U S A N

NOMOR 763/PDT/2018/PT.DKI

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-Perkara perdata pada tingkat banding, menjatuhkan putusan dibawah ini dalam perkara antara :

Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Cq Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok, beralamat di Jalan Pabean Nomor 1 Tanjung Priok Jakarta Utara, yang diwakili oleh Kigus Ahmad Badaruddin selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, beralamat di Gedung Juanda I Lantai 3 Jalan DR. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. Indra Surya, S.H., LL.M., 2. Obor P. Hariara, S.H., S.N. 3. S.N. Irfansyah, S.H., M.H., 4. Usmam Amirullah, S.H., M.H., 5. Yadhya Cahyadi, S.H., M.H., 6. Panji Adhissetiawan, S.H., M.H., 7. Rachmat Sazali, S.H., M.H., 8. Rachman, S.H., 9. Shanti, S.H., 10. Finna, S.H., (masing-masing selaku Pejabat dan Pegawai Biro Bantuan Hukum) 11. Sugeng Apriyanto, S.Sos., M.Si., 12. Didit Prayudi Sidharta, S.H., M.H., 13. Alvari Ovinda Adna, S.E., 14. Mochamad Basri, S.E., M.M., 15. Trisono., 16. Riswandono, S.H., M.H., 17. Riski A. Sompie, S.H., 18. Ria Novika Sari, S.H., 19. Jeffrey Lawrance, S.H., (masing-masing selaku pejabat pada Direktorat Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe A Tanjung Priok DJBC) memilih domisili hukum di Gedung Juanda I Lantai 15 Jalan DR. Wahidin No.1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-358/MK.1/2014 tanggal 18 Desember 2014, selanjutnya disebut **Pembanding /semula Terlawan I.-**

m e l a w a n

1. Motor Image Enterprises PTE LTD, beralamat kantor di 25 Leng Kee Road Singapura 159097, yang diwakili oleh GOH LENG KWANG selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding / semula Pelawan I .-**
2. TC Subaru SDN BHD, berkedudukan di No. 10 Jalan 51A/ 22346100 Petaling Jaya Selangor Malaysia, yang diwakili oleh LEE CHOW YOKE selaku Direktur, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding /semula Pelawan II.-**

Hal. 1 Putusan No.763/Pdt/2018/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding /semula Pelawan I dan II dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Prof. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M., 2. Lelyana Y. Santosa, S.H., 3. Hesty Setyowati, S.H., LL.M., 4. Ahmad Irfan Arifin, S.H., LL.M., 5. Dr. Julius I.D. Singara, S.H., D.E.A., 6. Leonard Arfan Aritonang, S.H., 7. Doly James Simangunsong, S.H., 8. Tagor Ricardo Sibarani, S.H., 9. Hamonangan B. Harahap, S.H., 10. Immanuel Sianipar, S.H., 11. Ando Christian Girsang, S.H., 12. Aristo Pangaribuan, S.H., LL.M., 13. Adi Putra Buana Yunara Batubara, S.H., 14. Rando Purba, S.H., 15. M. Ponti Azani, S.H., 16. Yosua Lamboy Situmorang, S.H., masing-masing Advokat pada kantor “ LUBIS, SANTOSA & MARAMIS “ Law Firm beralamat di Equity Tower Lantai 12 Sudirman Central Business District (SCBD) Lot 9 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 23 Juni 2015, dapat juga disebut Para Terbanding /semula Para Pelawan.-

3. PT. TC SUBARU, beralamat di Jalan Sultan Iskandar Muda Arteri Pondok Indah No. 24 Rt.012/ Rw.02 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding /semula Terlawan II.-

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama Muhammad Syah Perkasa selaku Operation Senior Manager PT. TC. SUBARU, berdasarkan Surat Izin Beracara secara Insidentile di Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 05/P.H.K.I/VI/2015/PN.Jkt.Ut tanggal 23 Januari 2015.-

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 April 2016 Nomor 457/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr dalam perkara para pihak tersebut di atas.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding /semula Para Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan terhadap Pembanding /semula Terlawan I melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang diterima dan terdaftar di kepaniteraan Perdata pada tanggal 10 November 2014, register Nomor 457/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr sebagai berikut :

Hal. 2 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POSISI HUKUM PARA PIHAK & KRONOLOGIS PERKARA

TERLAWAN I TELAH MELAKUKAN PENYITAAAN SECARA TIDAK SAH DAN MELAWAN HUKUM TERHADAP KENDARAAN BERMOTOR (MOBIL) YANG DIMILIKI OLEH PARA PELAWAN ;

1. TERLAWAN II (PT TC Subaru) merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor mobil merek Subaru dan didirikan berdasarkan hukum Negara Indonesia;
2. Pada tanggal 1 November 2009, TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk mengadakan kerjasama distribusi dengan Fuji Heavy Industries Ltd, suatu perusahaan yang didirikan di Jepang ("Fuji"). Berdasarkan perjanjian ini, TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah diberikan hak eksklusif untuk membeli mobil Subaru dari Fuji dan/atau pihak lainnya yang ditunjuk oleh Fuji dengan tujuan untuk menjual mobil-mobil tersebut di Indonesia. PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) adalah merupakan 2 (dua) dari pihak-pihak yang ditunjuk oleh Fuji sebagai pemegang hak untuk menjual mobil Subaru kepada TERLAWAN II. Mobil-mobil yang disita oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam gugatan perlawanan ini bukanlah mobil-mobil yang dijual oleh Fuji kepada PT TC Subaru dan Fuji tidak menyatakan kepemilikannya atas mobil-mobil yang disita tersebut;
3. Berdasarkan hal tersebut, PELAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk melakukan perjanjian jual beli secara terpisah kepada masing-masing PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd), yang keduanya dibuat pada tanggal 7 Desember 2012. Perjanjian jual beli tertanggal 7 Desember 2012 antara PELAWAN II (PT TC SUBARU) dan PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian I" dimana perjanjian jual beli tanggal 7 Desember 2012 antara TERLAWAN II (PT TC SUBARU) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian II". Perjanjian I dan Perjanjian II secara bersama-sama disebut sebagai "Perjanjian Jual Beli". Berdasarkan perjanjian jual beli tersebut, PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) telah sepakat untuk menjual beberapa mobil Subaru dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk membeli beberapa mobil tersebut dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam perjanjian - perjanjian tersebut. Hubungan hukum antara PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan TERLAWAN II (PT TC Subaru), sebagaimana PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) adalah

Hal. 3 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hubungan jual beli. Selain dari kewajiban untuk membayar atas mobil-mobil yang telah dibeli dari PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd), TERLAWAN II (PT TC Subaru) tidak mempunyai kewajiban, lain kepada PELAWAN I Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) berdasarkan Perjanjian I dan Perjanjian II. Perjanjian I menimbulkan hubungan antara pembeli dan penjual diantara TERLAWAN II (PT TC Subaru) dan PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd). Hal yang sama juga berlaku bagi Perjanjian II yang menimbulkan hubungan antara pembeli dan penjual diantara TERLAWAN II (PT TC Subaru) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd). Selain dari hubungan ini, Perjanjian I dan Perjanjian II tidak menimbulkan hubungan lainnya diantara para pihak;

4. Berdasarkan Perjanjian I dan Perjanjian II, mobil-mobil yang dibeli oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) tidak menjadi milik TERLAWAN II (PT TC Subaru) hingga biaya pembelian dibayarkan secara lunas oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru), baik kepada PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd). Oleh karena biaya pembelian belum dibayarkan secara lunas, maka mobil-mobil yang dijual oleh PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) yang belum dibayarkan masih merupakan milik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) atau PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd). Untuk penjelasan lebih lanjut harap lihat angka 28-31 perlawanan ini;
5. Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukai melakukan kegiatan audit bea cukai untuk periode audit 1 Desember 2011 - 30 November 2013 kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru) atas kegiatan impor kendaraan merek Subaru;
6. Berdasarkan kegiatan audit tersebut, pada tanggal 17 Juli 2014, Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukai mengeluarkan laporan hasil audit No. LHA-146/BC.62/IU/2014 yang menyatakan bahwa terdapat kekurangan pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang harus ditanggung TERLAWAN II (PT TC Subaru) sebagai akibat kesalahan pemberitahuan nilai pabean atau nilai transaksi yang tidak dilaporkan oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) dalam pemberitahuan impor barang;
7. Terhadap kekurangan bayar tersebut, berdasarkan Surat Penetapan Kembali Tarif dan Atau Nilai Pabean ("SPKTNP") yang dikeluarkan oleh Direktorat Audit Dirjen Bea dan Cukai, maka TERLAWAN II (PT TC Subaru) diwajibkan untuk melunasinya paling lambat pada tanggal 15 September 2014;

Hal. 4 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kemudian, pada tanggal 6 September 2014, TERLAWAN II (PT TC Subaru) mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, namun permohonan tersebut ditolak. Terhadap penolakan tersebut, pada tanggal 8 September 2014, TERLAWAN II mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak yang saat ini masih dalam proses pemeriksaan;
9. Selanjutnya, menindaklanjuti kedua Surat tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia melakukan penyitaan atas sejumlah 243 (dua ratus empat puluh tiga) dari 261 (dua ratus enam puluh satu) unit mobil merek Subaru milik PARA PELAWAN yang terdapat di beberapa kantor, gudang dan/atau showroom TERLAWAN II (PT TC Subaru) yang berlokasi di Pondok Indah, Marunda, Batam, Alam Sutera, Malang, Denpasar dan Surabaya;
10. Khusus dalam perkara aquo, PARA PELAWAN melakukan perlawanan atas penyitaan sejumlah unit mobil merek Subaru milik PARA PELAWAN yang terdapat di kantor TERLAWAN II yang beralamat di Marunda yang masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara;
11. Berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.01/SITA/2014, BA-04/KPU.01/SITA/2014, BA-05/KPU.01/SITA/2014, BA-06/KPU.01/SITA/2014, dan BA-07/KPU.01/SITA/2014, TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) menyita 172 (seratus tujuh puluh dua) mobil merek Subaru yang terdapat di Gudang TERLAWAN II (PT TC Subaru), di JL. Madiun Blok C2 (KBN Marunda), Jakarta Utara, Indonesia;
12. Adapun 172 (seratus tujuh puluh dua) mobil merek Subaru yang disita TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) adalah sebagaimana tercantum dalam Label-Label dibawah ini;
 - A. Dari 172 mobil yang disita tersebut terdapat 159 mobil yang belum dibayar oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) kepada PARA PELAWAN sehingga 159 (seratus lima puluh sembilan) unit mobil tersebut masih milik PARA PELAWAN. Rincian langsung unit mobil tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Barang	Nomor Rangka	No Bill of Lading	No. Pemberitahuan Impor Barang	No. Invoice	Penjual
1.	IMPREZA 5D 2.5 STI AWD 6MT	JF1GRFKH 3CGO5922 1	JKT 83598-01	000000005615-2012071000056 5	No 0054 Tanggal 5 Juli 2012	Motor Enterprises Pte Ltd
2.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT-	PLPGP7KC 5EA30772 0	PKGJKT10 422	000000-006276-2014042500025 9	No 264/14 Tanggal 11 April 2014	TC Subaru Sdn Bhd

Hal. 5 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	14MY					
3.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30777 7	PKGJKT 10422	000000-006276- 2014042500025 9	No 264/14 Tanggal 11 April 2014	TC Subaru Sdn Bhd
4.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30781 3	PKGJKT07 279	000000-006276- 2012112000005 0	No 003/12 tanggal 9 November 2012	TC Subaru Sdn Bhd
5.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30782 7	PKGJKT10 568	000000-006276- 2014051900027 2	No 291/14 Tanggal Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
6.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30785 1	PKGJKT10 568	000000-006276- 2014051900027 2	No 291/14 Tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
7.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30785 4	PKGJKT10 568	000000-006276- 2014051900027 2	No 291/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
8.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY Sport	PLPGP7KC 5EA30786 4	PKGJKT10 568	000000-006276- 2014051900027 2	No 291/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
9.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30778 7	PKGJKT10 613	000000-006276- 2014052800027 5	No 292/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
10.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30778 8	PKGJKT10 613	000000-006276- 2014052800027 5	No 292/14 Tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
11.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30780 2	PKGJKT10 613	000000-006276- 2014052800027 5	No 292/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
12.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30785 8	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 292/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
13.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30787 5	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 292/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
14.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30787 8	PKGJKT 0613	000000-006276- 20140528- 000275	No 292/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
15.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30787 9	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 292/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd

Hal. 6 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30788 4	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 292/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
17.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30789 0	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 292/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
18.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30788 9	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 291/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
19.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30789 2	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 291/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
20.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30790 1	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 291/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
21.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30792 8	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 291/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
22.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30793 6	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 291/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
23.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30794 1	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 291/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
24.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30794 2	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 291/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
25.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30795 6	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 291/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
26.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30795 8	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 291/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
27.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30796 5	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 291/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
28.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30796 6	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 291/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
29.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30796 9	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 291/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd

Hal. 7 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30797 1	PKGJKT10 613	000000-006276- 20140528- 000275	No 291/14 tanggal 7 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
31.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30737 2	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 303/14-A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
32.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30785 0	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 303/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
33.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30790 5	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 303/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
34.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT 14MY	PLPGP7KC 5EA30796 0	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 303/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
35.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30797 0	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 303/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
36.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30798 5	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 303/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
37.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30798 6	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 303/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
38.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30799 0	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 303/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
39.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30799 4	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 303/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
40.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30799 5	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 303/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
41.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30802 3	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 303/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
42.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30802 4	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 303/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd

Hal. 8 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30807 4	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 303/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
44.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30787 4	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 304/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
45.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30791 0	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 304/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
46.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30795 7	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 304/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
47.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30796 1	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 304/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
48.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30800 1	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 304/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
49.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30804 3	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 304/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
50.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30804 8	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 304/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
51.	SUBARU X V2.Oi AWD Ck 14MY	PLPGP7KC 5EA30805 3	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 304/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
52.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30805 7	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 304/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
53.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30805 8	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 304/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
54.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30807 2	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 304/14- A Tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
55.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30807 3	PKGJKT10 722	000000-006276- 20140609- 000283	No 304/14- A tanggal 26 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
56.	IMPREZA 4D1.61-S AWD 5MT	JFIGJ3KF CG004407	XT 63786- 01		No 0065 tanggal 17 Agustus	Motor Image Enterprises

Hal. 9 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2012	Pte Ltd
57.	IMPREZA 4D1.61-S AWD 5MT	JFIGJ3KF3 CG004369	JKT 63786- 01		No 0065 tanggal 17 Agustus 2012	Motor Image EnterprisesPt e Ltd
58.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30773 7		000000-006276- 20140621- 000290	No 316/14- A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
59.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30800 0		000000-006276- 20140621- 000290	No 316/14- A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
60.	SUBARU X AWD CVT- 14MY	V2.0PLPGP7 KC 5EA30801 5		000000-006276- 20140621- 000290	No 316/14- A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
61.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30801 8		000000-006276- 20140621- 000290	No 316/14- A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
62.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30807 6		000000-006276- 20140621- 000290	No 316/14- A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
63.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30826 1		000000-006276- 20140621- 000290	No 316/14- A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
64.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30827 0		000000-006276- 20140621- 000290	No 316/14- A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
65.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30828 0		000000-006276- 20140621- 000290	No 316/14- A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
66.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30825 9		000000-006276- 20140621- 000290	No 316/14- A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
67.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30832 1		000000-006276- 20140621- 000290	No 316/14- A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
68.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30821 0		000000-006276- 20140621- 000290	No. 317/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
69.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30822 0		000000-006276- 20140621- 000290	No. 317/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd

Hal. 10 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30822 1		000000-006276- 20140621- 000290	No.317/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
71.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30828 6		000000-006276- 20140621- 000290	No.317/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
72.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30829 1		000000-006276- 20140621- 000290	No. 317/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
73.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30829 4			No. 317/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
74.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30829 5			No. 317/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
75.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30830 1			No.317/14-A Tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
76.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30830 2			No.317/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
77.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30831 6			No.317/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
78.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30831 8			No. 317/14-A Tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
79.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30825 4			No. 317/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
80.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30832 6			No. 317/14-A tanggal 27 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
81.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30824 3	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd

Hal. 11 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY Sport	PLPGP7KC 5EA30826 0	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
83.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30829 2	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
84.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30830 7	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
85.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30830 8	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
86.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30831 3	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
87.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30832 2	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
88.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30832 5	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
89.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30832 8	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
90.	SUBARU X V2.Oi AWD CVI- 14MY	PLPGP7KC 5EA30833 2	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
91.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30833 4	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
92.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30833 9	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd

Hal. 12 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93.	SUBARU X 2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30834 0	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
94.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30834 1	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
95.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30834 8	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
96.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30835 0	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
97.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30836 4	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
98.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30836 5	PKGJKT 10781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 321/14-A tanggal 30 Mei 2014	TC Subaru Sdn Bhd
99.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30828 5	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
100.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30830 0	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
101.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30833 8	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
102.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30834 9	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
103.	SUBARU X V2.01 AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30835 4	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
104.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30835 5	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd

Hal. 13 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30835 8	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
106.	SUBARU X V2.0i AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30835 9	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
107.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30836 0	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
108.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30836 6	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
109.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30836 9	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
110.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30837 4	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
111.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30837 5	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
112.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30837 6	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
113.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30838 1	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
114.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30838	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
115.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY Sport	PLPGP7KC 5EA30838 3	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
116.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY Sport	PLPGP7KC 5EA30838 5	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru San Bhd
117.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30838 6	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd

Hal. 14 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30838 9	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
119.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30839 1	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
120.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30839 3	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
121.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30839 8	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
122.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30840 — 4	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
123.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30840 5	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
124.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 14MY	PLPGP7KC 5EA30841 5	PKGJKT10 781	000000-006276- 20140621- 000291	No. 323/14-A tanggal 5 Juni 2014	TC Subaru Sdn Bhd
125.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 15MY STI	PLPGP7KC 5FA308762	PKGJKT10 910	000000-006276- 20140715- 000298	No. 325/14-A tanggal 3 Juli 2014	TC Subaru Sdn Bhd
126.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 15MY STI	PLPGP7KC 5FA308765	PKGJKT10 910	000000-006276- 20140715- 000298	No. 325/14-A tanggal 3 Juli 2014	TC Subaru Sdn Bhd
127.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 15MY STI	PLPGP7KC 5FA308767	PKGJKT10 910	000000-006276- 20140715- 000298	No. 325/14-A tanggal 3 Juli 2014	TC Subaru Sdn Bhd
128.	SUBARU X V2.Oi AWD CVT- 15MY STI	PLPGP7KC 5FA308772	PKGJKT10 910	000000-006276- 20140715- 000298	No. 325/14-A tanggal 3 Juli 2014	TC Subaru Sdn Bhd
129	SUBARU WRX 2.0 AWD CVT	JF1VAGK8 5FG00329 4	JKT 66634- 01		No. 0029- A tanggal 16 Juli 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd
130	SUBARU BRZ 2.0 RWD 6AT	JFIZC6K72 DG003528	JKT 6678- 01		No. 0035 tanggal 19 Agustus 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd
131	SUBARU WRX STI 2.5 AWD 6MT	JFIVAFKH 3FG00440 0	JKT 66817- 01		No. 0037 tanggal 29 Agustus 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd

Hal. 15 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132	SUBARU WRX STI 2.5 AWD 6MT	JFIVAFKH 3FG00426 7	JKT 66817- 01		No. 0037 tanggal 29 Agustus 2014	Motor Image Enterprises Pte Ltd
133.	FORESTER .OX AWD 4AT	JFISHJKS5 CG085101	JKT 63914- 01	000000-005615- 20120917- 000577	No. 0068 tanggal September 2012	Motor Image Enterprises Pte Ltd
134.	IMPREZA 4D 2.5 STI AWD SAT	JF IGVFKV 5CG02275 0	JKT 63944- 01	000000-005615- 20121008- 000579	No. 0072- A tanggal 20 September 2012	Motor Image Enterprises Pte Ltd
135.	FORESTER 2.5 XT AWD 4AT	JFI SH9KT5 BG075612				
136.	IMPREZA 4D 2.01-S AWD CVT	JFIGJ7KC 5CG00373 0				
137.	IMPREZA 4D 2.5 STI AWD 5AT	JFIGVFKV 5CG02256 9				
138.	EXIGA 2.01 AWD 4AT	YA5- 011763				
139.	IMPREZA 5D 2.5 STI AWD 5AT	JFI GRFKV 5CG05928 7				
140.	FORESTER 2.OX AWD 4AT	JFISHJKS5 CG087563				
141.	FORESTER 2.OX AWD 4AT	JFISHJKS5 CG082996				
142.	IMPREZA 4D 2.01-S AWD CVT	JFIGJ7KC 5CG00458 6				
143.	IMPREZA 4D 2.01-S AWD CVT	JFIGJ7KC 5CG00461 3				
144.	IMPREZA 4D 2.01-S AWD CVT	JFIGJ7KC 5CG00469 6				
145.	IMPREZA 5D 2.5 STI AWD 5AT	JFIGRFBV 5CG05947 3				
146.	IMPREZA 5D 2.5 STI AWD 5AT	JFIGRFBV 5CG05951 3				
147.	IMPREZA 4D 2.5 STI AWD 5AT	JFIGVFKV 5CG02240 0				
148.	FORESTER 2.OX AWD 4AT	JFISHJKS5 CG083474				
149.	FORESTER 2.OX AWD 4AT	JFISHJKS5 CG085333				

Hal. 16 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.	FORESTER 2.OXT AWD CVT	JFISJGK85 DG019292				
151.	FORESTER 2.OXT AWD CVT	JFISJGK85 DG019352				
152.	FORESTER 2.OXT AWD CVT	JFISJGK85 DG019404				
153.	FORESTER 2.OXT AWD CVT	JFISJGK85 DG019665				
154.	FORESTER 2.OXT AWD CVT	JFISJGK85 DG019666				
155.	BRZ 2.0 RWD 6AT	JFIZC6K72 DG002088				
156.	FORESTER 2.5XT AWD 4AT	JFISH9KT5 BG075386				
157.	FORESTER 2.5XT AWD 4AT	JFISH9KT5 BG075380				
158.	FORESTER 2.5XT AWD 4AT	JF1SH9KT5 BG075006				
159.	IMPREZA 2.0R 5DR 4AT	JF1GH3K W4BG015548				

B. Berikut adalah 13 (tiga belas) unit Mobil yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) yang telah dilunasi oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) namun telah dibayar sehingga kepemilikannya telah beralih ke TERLAWAN II (PT TC Subaru)

No.	Barang	Nomor Rangka	No. Bill Of Lading	No Pemberitahuan Impor Barang	No Invoice	Penjual	Tanggal Pembayaran
1.	SUBARU XV2.OiAW DCVT	PLPGP7KC 5DA302133	PKGJKT08 577	000000006276- 20130603- 000113	No. 124/13-A tanggal 22Mei 2013	TC Subaru Sdn Bhd	18 Februari 2014 ke Tan Chong Motor Sales Pte Ltd atas perintah TC Subaru Sdn Bhd
2.	SUBARU XV2.OiAW D CVT	PLPGP7KC 5 DA302086	PKGJKT08 577	000000006276- 20130603- 000113	No. 124/13-A tanggal 22Mei 2013	TC Subaru Sdn Bhd	18 Februari 2014 ke Tan Chong Motor Sales Pte Ltd atas perintah TC Subaru Sdn Bhd

Hal. 17 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	SUBARU XV2.OiA WD CVT	PLPGP7KC 5DA302112	PKGJKT08 577	000000006276- 20130603- 000113	No. 124/13-A tanggal 22 Mei 2013	TC Subaru Sdn Bhd	18 Februari 2014 ke Tan Chong Motor Sales Pte Ltd atas perintah TC Subaru Sdn Bhd
4.	SUBARU XV2.OiA WD CVT	PLPGP7KC 5DA300053	PKGJKT07 538	000000004177- 20121218- 717419	No. 006-A tanggal Desember 2012	TC Subaru Sdn Bhd	9 April 2013 ke Tan Chong Motor Sales Pte Ltd atas perintah TC Subaru Sdn Bhd
5.	SUBARU XV2.OiA WD CVT	PLPGP7KC 5DA300039	PKGJKT07 538	000000004177- 20121218- 717419	No. 006 -A tanggal Desember 2012	TC Subaru Sdn Bhd	9 April 2013 ke Tan Chong Motor Sales Pte Ltd atas perintah TC Subaru Sdn Bhd
6.	SUBARU XV2.OiA WD CVT	PLPGP7KC 5DA300068	PKGJKT07 588	000000004177- 20121222- 717459	No. 007-A Tanggal 14 Desember 2012	TC Subaru Sdn Bhd	9 April 2013 ke Tan Chong Motor Sales Pte Ltd atas perintah TC Subaru Sdn Bhd
7.	SUBARU XV2.OiA WD CVT	PLPGP7KC 5DA300057	PKGJKT07 88	000000004177- 20121222- 717459	No. 007-A Tanggal 14 Desember 2012	TC Subaru Sdn Bhd	9 April 2013 ke Tan Chong Motor Sales Pte Ltd atas perintah TC Subaru
8.	SUBARU XV2.OiA WD CVT	PLPGP7KC 5DA300036					
9.	SUBARU XV2.OiA WD CVT	PLPGP7KC 5DA300026					
10.	SUBARU XV2.OiA WD CVT	PLPGP7KC 5 DA300027					
11.	SUBARU XV2.OiA WD CVT	PLPGP7KC 5 DA300044					
12.	SUBARU XV2.OiA WD CVT	PLPGP7KC 5 DA300049					
13.	SUBARU XV2.OiA WD CVT	PLPGP7KC 5 DA300056					

13. Berdasarkan Perjanjian Jual Beli (*Agreement to Sell*) yakni Perjanjian I dan Perjanjian II diketahui secara jelas bahwa 159 (seratus lima puluh sembilan) dari 172 (seratus tujuh puluh dua) unit mobil merek subaru yang disita di kantor

Hal. 18 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERLAWAN II BUKANLAH MILIK TERLAWAN II, namun masih merupakan milik PARA PELAWAN. Hal ini dikarenakan 159 (seratus lima puluh sembilan) dari 172 (seratus tujuh puluh dua) unit mobil Subaru tersebut belum dibayar oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru);

14. Karena alasan tersebut, baik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) segera mengirim surat kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru) pada 21 Oktober 2014 untuk menegaskan kembali haknya berdasarkan Perjanjian Jual Beli ketika PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) mengetahui bahwa beberapa mobil merek Subaru yang dijual oleh mereka kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah disita oleh Dirjen Bea Cukai, secara khusus, surat dari PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru):

- a. Menyatakan bahwa TERLAWAN II (PT TC Subaru) belum membayar mobil merek Subaru yang disita oleh Dirjen Bea Cukai secara lunas dan, berdasarkan ketentuan dalam masing-masing Perjanjian Jual Beli, hak milik atas mobil merek Subaru tersebut belum berpindah kepada TERLAWAN II (PT TC Subaru), tetapi masih dimiliki oleh PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd);
- b. Meminta TERLAWAN II (PT TC Subaru) untuk segera melakukan tindakan untuk melindungi hak-hak atas mobil yang disita dengan mengajukan keberatan yang diperlukan kepada Dirjen Bea Cukai untuk mengesampingkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melakukan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bea Cukai ; dan
- c. Memperingatkan TERLAWAN II (PT TC Subaru) bahwa PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) akan melakukan segala langkah yang dianggap penting untuk melindungi haknya masing-masing berdasarkan Perjanjian Jual Beli.

15. Dengan demikian TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) telah melakukan penyitaan terhadap barang bergerak (sejumlah unit mobil merek Subaru) milik PARA PELAWAN dan oleh karena itu penyitaan tersebut harus dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

I. YURISDIKSI PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA AQUO

BERDASARKAN UU NO.19/2000 JO. HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA, PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA MEMILIKI YURISDIKSI UNTUK MENGADILI GUGATAN DERDEN VERZET AQUO

Hal. 19 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 ("UU 19/2000") mengatur:

a. Pasal 38 ayat (1):

"Sanggahan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri"

b. Penjelasan Pasal 38 ayat (1):

"Hukum acara yang dipergunakan dalam mengajukan sanggahan adalah hukum acara perdata"

17. Hukum Acara Perdata Indonesia mengatur bahwa upaya hukum oleh pihak ketiga atas dilakukannya penyitaan (seperti sita jaminan), adalah upaya perlawanan atau yang disebut "derden verzet", yang pengaturannya adalah sebagai berikut:

17.1. Herzien Indisch Reglement ("HIR")

17.1.1. Pasal 195 (6)

"Jika hal menjalankan putusan itu dibantah, dan juga jika yang membantahnya itu orang lain, oleh karena barang yang disita itu diakuinya sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, dihadapkan kepada Pengadilan Negeri, yang dalam daerah hukumnya terjadi hal menjalankankan putusan itu, serta diputuskan juga oleh pengadilan itu."

17.2. Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007:

17.2.1. Derden verzet merupakan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi atau sita jaminan yang tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak milik, tetapi juga dapat didasarkan pada hak-hak lainnya.

17.2.2. Pada perlawanan ini, pihak ketiga tersebut harus dapat membuktikan yang disita dan apabila berhasil dibukti-kan, maka Majelis Hakim akan memerintahkan juru sita untuk diangkat bahwa ia mempunyai atas hak atas barang

17.3. Reglement op de Rechtsvordering ("Rv")

17.3.1. Pasal 378:

Pihak-pihak ketiga berhak melakukan perlawanan terhadap suatu putusan yang merugikan hak-hak mereka, jika mereka secara pribadi atau wakil mereka yang sah menurut

Hal. 20 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



hukum, atau pun pihak yang mereka wakili tidak dipanggil di sidang pengadilan, atau karena penggabungan perkara atau campur tangan dalam perkara pernah menjadi pihak.

17.3.2. Pasal 379:

Perlawanan ini diperiksa hakim yang menjatuhkan putusan itu. Perlawanan diajukan dengan suatu pemanggilan untuk menghadap sidang terhadap semua pihak yang telah mendapat keputusan dan peraturan umum mengenai cara berperkara berlaku dalam perlawanan ini.

17.3.3. Pasal 380:

Jika putusan yang demikian dijatuhkan terhadap pihak ketiga dalam suatu persidangan dan perlawanan terhadapnya dilakukan sesuai pasal yang lain, maka hakim yang memeriksa perkara berwenang jika untuk itu ada alasan-alasan mengizinkan penundaan perkara itu sampai perkara perlawanan diputus

17.3.4. Pasal 381:

Hakim yang memeriksa perkara perlawanan, jika ada alasan-alasannya, dapat menunda pelaksanaan putusan yang dilawan sampai saat perlawanan itu diputus.

17.3.5. Pasal 382:

Bila perlawanan disahkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki hanya sejauh hal merugikan hak-hak pihak ketiga itu, kecuali jika putusan yang dijatuhkan mengenai hal-hal yang tidak dapat dipecah, meng-hendaki pembatalan seluruh putusan.

17.4. Putusan Mahkamah Agung

17.4.1. Putusan Mahkamah Agung No. 3089 K/Pdt/1991 menjelaskan bahwa sita jaminan memberi hak kepada pemiliknya untuk mengajukan derden verzet.

17.4.2. Putusan Mahkamah Agung No. 996 K/Pdt/1989, menjelaskan bahwa derden verzet yang diajukan atas sita jaminan yang diletakkan dalam pengadilan negeri pada suatu perkara perdata, dapat dibenarkan selama putusan perkara yang dilawan (perkara pokok) belum mempunyai kekuatan hukum tetap serta sita jaminan tersebut belum diangkat.



17.5. Doktrin Hukum

17.5.1. Menurut Yahya Harahap, derden verzet atas sita jaminan dapat diajukan oleh pemilik selama perkara yang dilawan belum mempunyai putusan yang ber-kekuatan hukum tetap. Apabila perkara yang dilawan sudah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak ketiga adalah berbentuk gugatan perdata biasa.

17.5.2. Kemudian, apabila setelah proses pemeriksaan pengadilan belum diperoleh fakta bahwa harta tersebut benar merupakan milik pihak ketiga, maka tindakan yang harus dilakukan oleh hakim adalah:

- a. Hakim harus menerbitkan penetapan yang berisi perintah pengangkatan sita terhadap barang di-maksud; dan
- b. Jika barang itu berupa tanah atau kapal, yang pengumuman sitanya didaftarkan di kantor pen-daftaran tanah atau kapal maka pengangkatan sita tersebut segera diberitahukan kepada pejabat yang bersangkutan agar pengumuman sita dicabut dan obyek sitaan dipulihkan ke dalam keadaan tidak berada di bawah penyitaan;

18. Sesuai dengan penjelasan tersebut dan adanya Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.01/SITA/2014, BA-04/KPU.01/SITA/2014, BA-05/KPU.01/SITA/2014, BA-06/KPU.01/SITA/2014, dan BA-07/KPU.01/SITA/2014, maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara aquo.

III. PARA PELAWAN MEMPUNYAI KEPENTINGAN HAK-HAK YANG SECARA NYATA DIRUGIKAN AKIBAT PENYITAAN YANG DILAKUKAN TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) BARANG BERGERAK (SEJUMLAH 159 (SERATUS LIMA PULUH SEMBILAN) DARI 172 (SERATUS TUJUH PULUH DUA) UNIT MOBIL) YANG DISITA OLEH TERLAWAN I (DIRJEN BEA CUKAI KPU BEA CUKAI TIPE A TJ. PRIOK) DARI KANTOR TERLAWAN II (PT TC SUBARU) MERUPAKAN MILIK PARA PELAWAN, SEHINGGA DERDEN VERZET AQUO PATUTLAH DIKABULKAN

19. PARA PELAWAN mempunyai kepentingan dan hak yang secara nyata dirugikan akibat adanya penyitaan yang dilakukan oleh TERLAWAN I (DIRJEN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEA CUKAI KPU BEA CUKAI TIPE A TJ. PRIOK) berdasarkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.01/SITA/2014, BA-04/KPU.01/SITA/2014, BA-05/KPU.01/SITA/2014, BA-06/KPU.01/SITA/ 2014 , dan BA-07/KPU.01/SITA/2014 sebab kendaraan yang disita tersebut merupakan milik PARA PELAWAN;

20. PARA PELAWAN dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) telah sepakat untuk melakukan jual beli atas beberapa mobil merek Subaru termasuk komponen dan asesoris atas mobil tersebut;
21. Kemudian, berdasarkan Pasal 11 Perjanjian I dan Perjanjian II telah disepakati oleh PARA PELAWAN dan TERLAWAN II (PT TC Subaru), bahwa hukum yang berlaku untuk Perjanjian I dan Perjanjian II adalah hukum negara Singapura;
22. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;
23. Ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata mengandung asas perjanjian yang sudah berlaku secara umum yang telah dianut di Indonesia, yaitu asas kebebasan berkontrak dan asas pacta sunt servanda, atau disebut juga asas kepastian hukum;
24. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang menyatakan bahwa para pihak yang telah sepakat akan membuat perjanjian, bebas menentukan hal yang boleh dan tidak boleh dicantumkan dalam suatu perjanjian. Kesepakatan yang diambil oleh para pihak mengikat mereka sebagai Undang-undang dan harus diterapkan dengan seimbang diantara para pihak;
25. Selanjutnya, untuk asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak;
26. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pada Pasal 1337 KUH Perdata diatur bahwa suatu perjanjian dinyatakan terlarang apabila melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum;
27. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa mengingat Perjanjian I dan Perjanjian II dibuat berdasarkan hukum negara Singapura yang mana merupakan kebebasan para pihak untuk menentukan pilihan hukum dalam perjanjian berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, berdasarkan hukum Indonesia, maka Perjanjian I dan Perjanjian II merupakan perjanjian

Hal. 23 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah bagi PARA PELAWAN dan TERLAWAN II (PT TC Subaru) sehingga hakim harus menghormati substansi Perjanjian I dan Perjanjian II yang dibuat oleh para pihak sesuai dengan asas pacta sunt servanda;

28. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 (tentang Peralihan Hak Milik) Perjanjian I dan Perjanjian II telah secara tegas diatur bahwa:

"Pasal 4 Peralihan Hak Milik"

Pasal 4.1 Resiko dari Produk Kontrak akan berpindah dari penjual kepada pembeli pada saat Produk Kontrak telah diterima oleh pembeli.

Pasal 4.2 Walaupun dalam hal penerimaan, resiko terhadap barang telah berpindah kepada pembeli, hak kepemilikan atas Produk Kontrak tidak berpindah kepada pembeli sampai dengan penjual menerima pembayaran secara penuh (dalam bentuk tunai atau cleared funds) atas Produk Kontrak dan Produk Kontrak lainnya atau barang lainnya yang telah disuplai oleh penjual kepada pembeli sehubungan dengan pembayaran tersebut telah jatuh tempo, dalam hal tersebut maka hak kepemilikan atas Produk Kontrak berpindah pada saat keseluruhan pembayaran telah dilakukan.

29. Berdasarkan dokumen tagihan dari PARA PELAWAN diketahui bahwa 159 (seratus lima puluh sembilan) dari 172 (seratus tujuh puluh dua) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai Type A Tj. Priok) di kantor TERLAWAN II (PT TC SUBARU) belum dilunasi pembayarannya oleh TERLAWAN II (PT TC SUBARU) kepada PARA PELAWAN;

30. Akibatnya, sampai saat diajukannya gugatan aquo, seluruh 159 (seratus lima puluh sembilan) dari 172 (seratus tujuh puluh dua) unit mobil yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) belum dibayarkan oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru), sisanya 13 (tiga belas) unit mobil telah dibayarkan oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) sebagaimana terdapat di halaman 26-28 dari perlawanan ini. Sehingga 159 (seratus lima puluh sembilan) unit mobil tersebut masih dimiliki oleh PARA PELAWAN. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 Perjanjian I dan Perjanjian II:

30.1. Berdasarkan pasal 1338 KUH Perdata diatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya serta harus dilaksanakan dengan itikad baik.

31. Kepemilikan PARA PELAWAN karena belum lunasnya pembayaran mobil-mobil tersebut diakui oleh TERLAWAN II (PT TC Subaru) dalam gugatan TERLAWAN II (PT TC Subaru) No. 095/TCS-OPS/X/14 tertanggal 24 Oktober 2014. Halaman 5 gugatan tersebut menyatakan:

Hal. 24 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kendaraan merek Subaru yang terletak di Marunda, Jakarta

"Masih merupakan milik penjual dan bukan merupakan milik PT TC Subaru mengingat sampai saat surat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Pajak, PT TC Subaru soma sekali belum melakukan pelunasan atas harga pembelian kendaraan bermotor"

Selanjutnya dalam gugatan yang sama, TERLAWAN II (PT TC Subaru) pun telah mengakui bahwa berdasarkan Perjanjian I dan Perjanjian II, mobil-mobil yang disita tersebut adalah bukan milik TERLAWAN II (PT TC Subaru) melainkan milik PARA PELAWAN.

32. Berdasarkan penjelasan tersebut dan bukti-bukti otentik yang mendukung argumen tersebut, maka PARA PELAWAN merupakan pihak yang beritikad baik dan dengan demikian haruslah dilindungi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi sebagai berikut:

a. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 251 K/Sip/1958 tertanggal 26 Desember 1958, yang berbunyi:

"Pembeli yang beritikad baik (te goede trouw) haruslah diperlindungi, Putusan Pengadilan Tinggi tentang Itikad baik seorang Pembeli tanah tidak takluk kepada Putusan Kasasi oleh karena merupakan peng-hargaan dari suatu kenyataan"

b. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3201 K/Pdt/1991 tertanggal 30 Januari 1996, yang berbunyi:

"Pembeli yang beritikad baik (te goede trouw) harus dilindungi"

c. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3275 K/Pdt/1995 tertanggal 25 September 1996, yang berbunyi:

"Apabila Pembantah dapat membuktikan bahwa tanah sengketa dibeli oleh Pembantah di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tanah itu masih tercatat atas nama si Penjual maka Pembantah adalah Pembantah yang beritikad baik"

Putusan No.21 /PDT.PIw./2012/PN.SLMN tanggal 13 Agustus 2012:

"...Bahwa berdasarkan keterangan saksi Para Pelawan yang pada pokoknya telah terjadi jual beli antara Terlawan II dengan Para Pelawan yang diperkuat dengan bukti P- 1 s/d P- 7 yang mono bukti - bukti tersebut merupakan bukti surat yang berupa akte otentik menurut pasal 165 HIR merupakan bukti yang sempurna, lain dari pada itu tidak pernah dibantah kebenarannya oleh Terlawan II, dengan demikian tuntutan Para Pelawan pada petitum ke - 2 tersebut haruslah dikabulkan..."

Hal. 25 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung No. 710 PK/Pdt /2011 tanggal 3 Februari 2012:

"...Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, Judex Juris /Pengadilan Negeri telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan Yang nyata karena Pelawan membeli obyek sengketa dari Terlawan II yang telah bersertifikat atas nama Terlawan II pada Tahun 2003 di hadapan PPAT, saat ini obyek sengketa, telah dibalik nama atas nama Pelawan, oleh karena itu Pelawan sebagai pembeli yang beritikad baik harus dilindungi..."

33. Atas penyitaan yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) terhadap mobil merek Subaru yang merupakan milik dari PARA PELAWAN, maka PARA PELAWAN telah mengalami kerugian sejumlah Rp 41.507.906.970,34 (empat puluh satu milyar lima ratus tujuh juta sembilan ratus enam ribu sembilan ratus tujuh puluh, tiga puluh empat rupiah) dan kerugian tersebut masih terus bertambah;
34. Untuk mengantisipasi adanya upaya eksekusi yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) berdasarkan Pasal 27 UU No. 19/1997 Jo. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa atau setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Pajak, maka sudah sepatutnyalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menunda seluruh proses eksekusi yang akan dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) sebelum adanya putusan akhir atas perkara aquo;
35. Kecuali permohonan kami dikabulkan, PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) akan mengalami kerugian apabila TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) meletakkan sita dan menjual mobil merek Subaru tersebut. Hal ini dikarenakan:
 - a. TERLAWAN II (PT TC Subaru) belum membayar biaya pembelian atas 159 (seratus lima puluh sembilan) dari 172 (seratus tujuh puluh dua unit mobil yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok);
 - b. Penyitaan dan pelelangan akan menyebabkan PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) mengalami kerugian atas biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli atau merakit mobil-mobil tersebut, dan termasuk dengan adanya fakta bahwa PELAWAN I Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) belum menerima pembayaran atas mobil-mobil tersebut; dan

Hal. 26 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila terdapat pelelangan atas mobil-mobil tersebut, maka akan merusak nama baik PELAWAN I (Motor Image Enterprise Pte Ltd) dan PELAWAN II (TC Subaru Sdn Bhd) secara signifikan.

IV. PETITUM

36. Berdasarkan uraian di atas, maka PARA PELAWAN meminta Pengadilan Negeri Jakarta Utara qq. Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut:

36.1. Dalam Provisi:

- (1) Menunda secara serta merta seluruh proses dan upaya eksekusi yang dilakukan oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) berdasarkan Pasal 27 UU No. 19/1997 Jo. 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sampai Ada putusan akhir atas perkara aquo.

36.2. Dalam Pokok Perkara:

- (1) Mengabulkan gugatan aquo untuk seluruhnya;
- (2) Menyatakan bahwa PARA PELAWAN adalah pelawan yang beritikad baik, yang wajib dilindungi oleh hukum (te goeder throuw) dan pelawan yang benar;
- (3) Memerintahkan TERLAWAN I untuk mengeluarkan 159 (seratus limapuluh sembilan) unit mobil milik PARA PELAWAN dari Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01 /KPU.01 /SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.01 /SITA/2014, BA-04/KPU.01/SITA/2014, BA-05/KPU.01/SITA/ 2014, BA-06/KPU.01 /SITA/2014, dan BA-07/KPU.01 /SITA/2014
- (4) Menyatakan bahwa Surat Perintah Melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.01 /SITA/2014, BA-04/KPU.01/SITA/2014, BA- 05/KPU.01 /SITA/2014, BA-06/KPU.01 /SITA/2014, dan BA07/KPU.01 /SITA/2014 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada PARA PELAWAN;
- (5) Menyatakan bahwa 159 (seratus limapuluh sembilan) dari 172 (seratus tujuh puluh dua) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.01 /SITA/2014, BA-04/KPU.01/SITA/2014 BA-05/KPU.01/SITA/2014, BA06/KPU/SITA/2014, dan BA-07/KPU.01/SITA/2014, adalah barang (mobil) milik PARA PELAWAN;

Hal. 27 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Menyatakan TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) tidak mempunyai hak hukum apapun terhadap 159 (seratus lima puluh sembilan) dari 172 (seratus tujuh puluh dua) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.01/SITA/2014, BA-04/KPU.01/SITA/2014 BA- 05/KPU.01/SITA/2014, BA-06/KPU/SITA/2014, dan BA- 07/KPU.01/SITA/2014 ;
 - (7) Menghukum TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) untuk mengembalikan dan menyerahkan 159 (seratus lima puluh sembilan) dari 172 (seratus tujuh puluh dua) unit mobil merek Subaru yang disita oleh TERLAWAN I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.01/SITA/2014, BA-04/KPU.01/SITA/2014, BA-05/KPU.01/SITA/2014, BA-06/KPU.01/SITA/2014, dan BA-07/KPU.01/SITA/2014 dalam keadaan bersih dari beban apapun;
 - (8) Menghukum TERLAWAN II (PT TC Subaru) untuk mematuhi isi putusan aquo.
 - (9) Menghukum TERLAWAN I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) untuk membayar seluruh biaya perkara.
- Atau
- (10) Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jinawab dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 April 2016 Nomor 457/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI

- Mengabulkan permohonan provisi Para Pelawan ;
- Memerintahkan untuk menunda secara serta merta seluruh proses dan upaya Eksekusi yang dilakukan oleh Terlawan I berdasarkan Pasal 27 UU No. 19/1997 Jo. 19/2000 tentang penagihan Pajak dengan Surat Paksa sampai ada putusan akhir atas perkara aquo.-

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terlawan I ;

Hal. 28 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III, DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik, yang wajib dilindungi oleh hukum (te goeder throuw) dan Pelawan yang benar ;
3. Memerintahkan Terlawan I untuk mengeluarkan 159 (seratus lima puluh sembilan) unit mobil milik Para Pelawan dari Surat Perintah melakukan penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 Jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.01/SITA/2014, BA-04/KPU.01/SITA/2014, BA-05/KPU.01/SITA/2014, BA-06/KPU.01/SITA/2014 dan BA-07/KPU.01/SITA/2014 ;
4. Menyatakan bahwa Surat Perintah melakukan Penyitaan Nomor 01/KPU.01/SPMP/2014 Jo. Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.01/SITA/2014, BA-04/KPU.01/SITA/2014 BA-05/KPU.01/SITA/2014 BA-06/KPU.01/SITA/2016 dan BA-07/KPU.01/SITA/2014 tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun kepada Para Pelawan ;
5. Menyatakan bahwa 159 (seratus lima puluh sembilan) dari 172 (seratus tujuh puluh dua) unit mobil merek Subaru yang disita oleh Terlawan I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj. Priok) sebagaimana yang tertuang berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.01/SITA/2014 BA-04/KPU.01/SITA/2014, BA-05/KPU.01/SITA/2014, BA-06/KPU.01/SITA/2014 dan BA-07/KPU.01/SITA/2014 adalah barang (mobil) milik Para Pelawan ;
6. Menyatakan Terlawan I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj.Priok) tidak mempunyai hak hukum apapun terhadap 159 (seratus lima puluh sembilan) dari 172 (seratus tujuh puluh dua) unit mobil merek Subaru yang disita oleh Terlawan I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.01/SITA/2014 BA-04/KPU.01/SITA/2014, BA-05/KPU.01/SITA/2014, BA-06/KPU.01/SITA/2014 dan BA-07/KPU.01/SITA/2014 ;
7. Menghukum Terlawan I (Dirjen Bea Cukai KPU Bea Cukai Tipe A Tj.Priok) untuk mengembalikan dan menyerahkan 159 (seratus lima puluh sembilan) dari 172 (seratus tujuh puluh dua) unit mobil merek Subaru yang disita oleh Terlawan I sebagaimana yang tertuang Berita Acara Pelaksanaan Sita Nomor BA-02/KPU.01/SITA/2014 BA-04/KPU.01/SITA/2014, BA-05/KPU.01/SITA/2014, BA-06/KPU.01/SITA/2014 dan BA-07/KPU.01/SITA/2014 dalam keadaan bersih dari beban apapun ;
8. Menghukum Terlawan II (PT.TC Subaru) untuk mematuhi isi putusan aquo ;

Hal. 29 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.331.000,- (satu juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Terbanding /semula Para Pelawan dan Turut Terbanding /semula Terlawan II, tanpa dihadiri oleh Pembanding /semula Terlawan I, namun terhadap yang tidak hadir telah diberitahukan isi putusan tersebut oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 18 Juli 2016.-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 April 2016 Nomor 457/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr tersebut Pembanding /semula tergugat I mengajukan Permohonan banding pada tanggal 26 Juli 2016 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara /Panitera Muda pidana dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Terbanding /semula Pelawan I pada tanggal 21 Desember 2017 dan diberitahukan Kepada Terbanding /semula Pelawan II pada tanggal 22 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Pembanding /semula Terlawan I mengajukan memori banding tertanggal 25 Agustus 2016. Turunan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding /semula Pelawan I pada tanggal 6 April 2018 dan kepada Terbanding /semula Terlawan II pada tanggal 22 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa Terbanding /semula Pelawan I dan II atas memori banding dari Pembanding /semula Terlawan I tersebut tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti kepada Pembanding /semula Terlawan I pada tanggal 29 Desember 2017, kepada Terbanding /semula Pelawan I pada tanggal 30 April 2018 dan kepada Terbanding /semula Pelawan II pada tanggal 22 Desember 2018.-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 30 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan perkara di tingkat banding, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara a quo oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 April 2016, dimana saat itu Pembanding /semula Terlawan I tidak hadir namun kepadanya telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 18 Juli 2016 dan pada tanggal 26 Juli 2016 Pembanding /semula Terlawan I mengajukan permohonan banding dan mencermati pula segala formalitas mengenai pemberitahuan /penyerahan memori banding dan pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permohonan banding tersebut maka permohonan banding dari Pembanding /semula Terlawan I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding /semula Terlawan I di dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pembanding /semula Terlawan I keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang telah mengabulkan tuntutan provisi, karena tidak terbukti adanya hal yang mendesak untuk mengabulkan tuntutan provisi tersebut sehingga tidak sepatutnya permohonan provisi dari Terbanding /semula Pelawan I dikabulkan ;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah keliru dan tidak tepat dalam mempertimbangkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Pembanding /semula terlawan I ;
- Bahwa Para Terbanding /semula Pelawan I dan II telah melakukan perubahan surat kuasa khusus pada saat acara persidangan telah sampai tahap replik, oleh karenanya Surat Kuasa Para Terbanding /semula Pelawan I dan II terhadap kuasa hukumnya tidak sah.-
- Bahwa konsep berperkara derden verset tidak dapat diberlakukan dalam perkara a quo, karena Para Terbanding /semula Pelawan I dan II bukan pihak ketiga yang dapat mengajukan perlawanan. Jadi dalam hal ini ada kesalahan formal.-
- Bahwa Para Terbanding /semula Pelawan I dan II tidak memiliki alas hak untuk mengajukan gugatan terhadap pelaksanaan surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan atau pengumuman lelang.-

Hal. 31 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terbanding /semula Pelawan I dan II tidak memiliki atas hak untuk mengajukan gugatan perlawanan berdasarkan pasal 38 Undang-undang PPSP karena Para Terbanding /semula Pelawan I dan II bukan pihak ketiga.-
- Bahwa perjanjian-perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Terbanding /semula Pelawan I dan II dengan turut Terbanding /semula Terlawan II tidak mengikat pihak ketiga.-
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memutus perkara a quo diluar kewenangannya (ultra vires).-
- Bahwa hal-hal selengkapannya yang dikemukakan oleh Pembanding /semula Terlawan I terurai di dalam memori bandingnya tertanggal 25 Agustus 2016 (terlampir sebagai berkas perkara).-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 April 2016 Nomor 457/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr dalam perkara para pihak tersebut di atas dan memperhatikan memori banding yang diajukan Pembanding /semula Terlawan I serta hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara tersebut, memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan perlawan yang diajukan Terbanding /semula Pelawan I dan II adalah sebagaimana tersebut di atas.-

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara perlawanan tersebut wajib diperhatikan aspek hukum materil dari gugatan yang diajukan Terbanding /semula Pelawan I dan II agar gugatan tersebut sah dan dapat dijadikan sebagai dasar pemeriksaan.-

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dikemukakan oleh para pihak baik yang didalilkan dalam gugatan maupun dalam jawab jinawab dan dari alat bukti yang telah diajukan oleh masing-masing dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pangkal permasalahan perkara a quo adalah berawal dari adanya utang pajak Turut Terbanding /semula Terlawan II yang timbul akibat diterbitkannya Surat Penetapan Kembali Tarip dan /atau Nilai Pabean (SPKTNP), dimana terhadap utang pajak tersebut telah dilakukan penagihan namun diabaikan oleh Turut Terbanding

Hal. 32 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/semula Terlawan II maka telah dilakukan penyitaan atas barang berupa mobil merk Subaru yang dianggap milik Turut Terbanding /semula Terlawan II.-

Menimbang, bahwa dari bukti T. I-78 sampai dengan bukti T.I-101 dan bukti T.I -104 sampai dengan bukti T. 128 dapat dibuktikan secara formal mobil merk Subaru yang disita tersebut adalah milik Turut Terbanding /semula Terlawan II, bukan milik dari Para Terbanding /semula Pelawan I dan II.-

Menimbang, bahwa terhadap utang pajak tersebut pемanding /semula Terlawan I Cq. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Cq. Kepala Kantor Pelayanan utama Bea dan Cukai Tipe A. Tanjung Priok telah mewajibkan kepada Turut Terbanding /semula Terlawan II agar melunasinya paling lambat tanggal 15 September 2014. Pada tanggal 6 September 2014 Turut Terbanding /semula Terlawan II mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, namun permohonan keberatan yang diajukan Turut Terbanding /semula Terlawan II tersebut ditolak. Kemudian Turut Terbanding /semula Terlawan II mengajukan upaya banding ke Pengadilan Pajak yang perkaranya saat ini masih dalam proses pemeriksaan.-

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas terbukti barang yang disita adalah milik Turut Terbanding /semula Terlawan II sebagai wajib pajak dan bukan milik dari Para Terbanding /semula Pelawan I dan II maka secara hukum Para Terbanding /semula Pelawan I dan II tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perlawanan perkara a quo.-

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya banding yang ditempuh oleh Turut Terbanding /semula Terlawan II ke Pengadilan Pajak yang kini masih dalam proses pemeriksaan, berarti masih belum jelas dan belum ada kepastian hukum tentang subyek pajak dan besar pajak yang diwajibkan sehingga belum dapat untuk menilai apakah sah tidaknya penyitaan dimaksud sebagaimana diutarakan dalam petitum gugatan perlawanan Para Terbanding /semula Pelawan I dan II atau dengan kata lain gugatan perlawanan Para Terbanding /semula Pelawan I dan II adalah prematur (excep tio delatoria).-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding /semula Pelawan I dan II tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perlawanan perkara a quo dan juga gugatan perlawanan tersebut prematur maka Para Terbanding /semula Pelawan I dan II adalah Pelawan yang tidak benar dan

Hal. 33 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perlawanan yang diajukan Para Terbanding /semula Pelawan I dan II tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.-

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding /semula Pelawan I dan II berada di pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini.-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 April 2016 Nomor 457/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini.-

Memperhatikan, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, KUHP, HIR dan Rv.-

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Terlawan I.-

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 April 2016 Nomor 457/Pdt.Plw/2014/PN.Jkt.Utr yang dimohonkan banding tersebut.-

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Para Terbanding /semula Pelawan I dan II adalah Pelawan yang tidak benar.-
- Menyatakan gugatan perlawanan Para Terbanding /semula Pelawan I dan II tidak dapat diterima.-
- Menghukum Para Terbanding /semula Pelawan I dan II membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150. 000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).-

Hal. 34 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **Kamis** tanggal **17 Januari 2019** oleh Kami : **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF. S.H.,M.Hum.** dan **HIDAYAT, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 763/PEN/PDT/2018 /PT.DKI. tanggal 3 Desember 2018, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **7 Februari 2019**, diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 763/PDT/2018/PT.DKI tanggal 3 Desember 2018, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.**

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.

2. **HIDAYAT, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
 2. Redaksi-----Rp. 5.000,-
 3. Pemberkasan-----Rp. 139.000.- +
- Jumlah-----Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 35 Putusan. No.763/Pdt/2018/PT.DKI.